

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

Strategi Meningkatkan Peranan Pertanian dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo

A Faroby Falatehan¹⁾, Harianto¹⁾, Ma'mun Sarma¹⁾

¹⁾ LOGED, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Kampus IPB Darmaga, Bogor

ABSTRACT

Gorontalo Regency is one of the districts that rely on the agricultural sector. The value of the agricultural sector in Gorontalo Regency has always increased but its role has decreased, from 2010 to 2016. The purpose of this study is to analyze whether agriculture is a base sector and analyze the development of the agricultural sector in Gorontalo Regency. Based on the results of LQ and Shift Share analysis, it can be concluded that the agricultural sector is a base sector, so it is a leading sector, but has slow growth and has no competitiveness in Gorontalo Regency. Therefore, the government needs to pay more attention to this agricultural sector, by increasing the linkages in conducting business between agricultural producers with their upstream and downstream activities.

Keywords: LQ; shiftshare; base sector; leading sector; slow growth

ABSTRAK

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Nilai sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo selalu meningkat tetapi perannya mengalami penurunan, dari tahun 2010 ke tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pertanian merupakan sektor basis dan menganalisis perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis LQ dan Shift Share, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis, sehingga merupakan sektor unggulan, tetapi memiliki pertumbuhan yang lamban dan tidak memiliki daya saing di Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor pertanian ini, melalui peningkatan keterkaitan dalam melakukan usaha antara produsen pertanian dengan kegiatan hulu dan hilirnya.

Keywords: LQ; shiftshare; sektor basis; sektor unggulan; pertumbuhan lamban

PENDAHULUAN

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten penghasil produk pertanian seperti Padi dan Jagung. Menurut Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo sub sektor tanaman pangan yang dilakukan oleh masyarakat pada periode 2010-2015 adalah kabupaten padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, selain itu

petani juga menanam berbagai sayur dan buah-buahan.

Potensi lahan Pertanian di Kabupaten Gorontalo adalah 15.569 ha dengan luas yang lahan terluas yang digunakan untuk sektor pertanian berada pada Tahun 2014 seluas 13.959 Ha. Potensi lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo paling banyak digunakan untuk memproduksi padi (152.307 ton), jagung (117.805 ton) dan hortikultur (21.804). Padi dan Jagung menjadi salah satu

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

komoditi unggulan dan prioritas Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu untuk perkebunan, pada periode tahun 2010-2016 terfokus pada komoditi kapuk, kelapa, kopi dan kakao. Komoditi perkebunan yang menjadi unggulan adalah Kelapa dan kakao perkebunan yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan rata-rata produksi kelapa per tahun mencapai 21,323.41 ton dan produksi kakao adalah 1,492.02 ton. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo periode tahun 2010-2016, rata-rata produksi kapuk dan kopi stabil di 121 ton (kapuk) dan 268 ton (kopi). Adapun kecamatan yang memiliki rata-rata produktivitas tanaman perkebunan tertinggi adalah Kecamatan Bongomeme, Limboto dan Limboto Utara.

Sebagai salah satu daerah yang mengandalkan pertanian, nilai sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo nilainya selalu meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,77%. Tetapi perannya mengalami penurunan, dari tahun 2010 ke tahun 2016, yaitu dari 39,82% menjadi 37,44%.

Sejak disempurnakannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah lalu membuat berbagai kebijakan dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan perekonomian daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya terutama dalam hal menggali potensi penerimaan daerah yang sah dan legal. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung peningkatan perekonomian daerah setempat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membiayai sebagian besar anggaran yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, maka pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan menjelaskan bahwa, daerah dalam melaksanakan fungsinya, tidak terlepas dari kemampuan dana yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Adapun sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi, terdiri dari pendapatan daerah serta pembiayaan. Sedangkan, sumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan tersebut adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Pinjaman Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah dimana meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
4. Untuk pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi salah satunya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Sumber-sumber pembiayaan tersebut akan dimanifestasikan melalui struktur PAD yang kuat dan mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut dikatakan memiliki kemampuan

pembiayaan yang juga kuat sehingga transfer dari pusat dalam bentuk DAU hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Widayat (1994) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
4. Adanya kebocoran-kebocoran;
5. Biaya pungut yang masih tinggi;
6. Banyak Perawatan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Jaya (1996) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Tingginya derajat sentralisasi ddam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Oleh karena itu pada kajian ini akan dianalisis bagaimana peranan sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Gorontalo. Apakah sektor pertanian merupakan sektor basis? Bagaimana perkembangan sektor pertanian terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Gorontalo? Kegiatan sektor pertanian apa saja yang sudah dapat dijadikan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan kajian ini adalah:

1. Menganalisis apakah sektor pertanian merupakan sektor basis
2. Menganalisis perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo
3. Menganalisis kegiatan sektor pertanian yang sudah dijadikan peluang sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo

METODOLOGI

Kajian akan dilakukan selama tujuh bulan, dari bulan Juli 2017 – Januari 2018. Kajian dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan cara survei, *in depth interview*, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta berbagai sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya.

Metode analisis dalam penelitian “Strategi Meningkatkan Peranan Pertanian Di Kabupaten Gorontalo” ini terdiri dari:

1. Analisis Location Quotien (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan atau basis aktivitas dan mengetahui kapasitas perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang dan jasa dari produksi lokal

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

suatu wilayah. Secara umum metode LQ digunakan untuk mengukur suatu sektor atau komoditi (misalnya sektor x atau komoditi x) menjadi kegiatan/komoditi basis atau non basis pada suatu wilayah tertentu (misalnya i) (Budiharsono, 2001). Nilai LQ diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana:

LQ = Nilai *Location Quotient*

v_i = PDRB AHDK tahun per sektor Kabupaten

v_t = Jumlah PDRB AHDK Kabupaten

V_i = PDRB AHDK tahun per sektor Provinsi

V_t = Jumlah PDRB AHDK Provinsi

Apabila nilai:

$LQ > 1$; maka PDRB per sektor merupakan sektor basis

$LQ < 1$; maka PDRB per sektor merupakan sektor non basis

2. Shift Share

Analisis shift share adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu. Terdapat tiga komponen utama yaitu:

a. Komponen Pertumbuhan Nasional (PN), yang memperlihatkan perubahan produksi/kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi/kesempatan kerja nasional, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. Rumus dari PN adalah:

$$PN_{ij} = (Ra) Y_{ij}$$

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) yang jika nilai $PP > 0$ maka sektor tersebut pertumbuhannya cepat dan sebaliknya. PP tersebut timbul karena

perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (kebijakan perpajakan, subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Rumus dari PN adalah:

$$PP_{ij} = (R_i - R_a) Y_{ij}$$

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) timbul karena peningkatan/penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibanding dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Rumus dari PPW adalah sebagai berikut:

$$PPW_{ij} = (r_i - R_i) Y_{ij}$$

Dalam hal ini, jika nilai $PPW > 0$ maka sektor tersebut berdaya saing baik dan sebaliknya. Kemudian dari komponen PP dan PPW tersebut, maka dapat dirumuskan perhitungan Pergeseran Bersih (PB), yaitu:

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Dimana, jika $PB_{ij} > 0$ maka sektor tersebut dikategorikan progresif, sedangkan jika $PB_{ij} < 0$ dikategorikan sektor yang lamban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gorontalo terbagi menjadi 19 Kecamatan, terdiri dari 191 desa dan 14 kelurahan. Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Limboto, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Asparaga dengan luas 430, 51 km² atau menempati 20,25 % luas daratan di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan yang paling sedikit luas wilayahnya adalah

Kecamatan Tilango dengan luas sebesar 5,79 km² atau menempati persentase 0,27 dari total seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Luas wilayah kabupaten Gorontalo secara keseluruhan sekitar 2.207,58 km². Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan dan 191 Desa dan 14 Kelurahan.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km 2)	% terhadap Luas Kabupaten
1	Batudaa Pantai	63.13	2.97
2	Biluhu	79.20	3.73
3	Batudaa	32.86	1.55
4	Bongomeme	144.16	6.78
5	Tabongo	54.8	2.58
6	Dungaliyo	46.62	2.19
7	Tibawa	145.34	6.84
8	Pulubala	240.57	11.32
9	Boliyohuto	60.59	2.85
10	Mootilango	211.49	9.95
11	Tolangohula	171.75	8.08
12	Asparaga	430.51	20.25
13	Bilato	112.34	5.29
14	Limboto	103.32	4.86
15	Limboto Barat	79.61	3.75
16	Telaga	28.16	1.32
17	Telaga Biru	108.84	5.12
18	Tilango	5.79	0.27
19	Talaga Jaya	6.41	6.41
Kabupaten Gorontalo		2,125.47	100

Sumber : BPS Kab Gorontalo. 2017

Perkembangan perekonomian Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2016, dari Rp 4,82 triliun meningkat menjadi Rp 9,99 triliun. Begitupula dengan sektor pertanian yang nilainya meningkat terus dari tahun 2010 ke tahun 2016, dari Rp 1,92 triliun menjadi Rp 3,74 triliun. Peningkatan PDRB Kabupaten Gorontalo, rata-rata meningkat sebesar 12,93% setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata PDRB ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata sektor pertanian, dimana rata-rata pertumbuhan sektor pertanian adalah 11,77%.



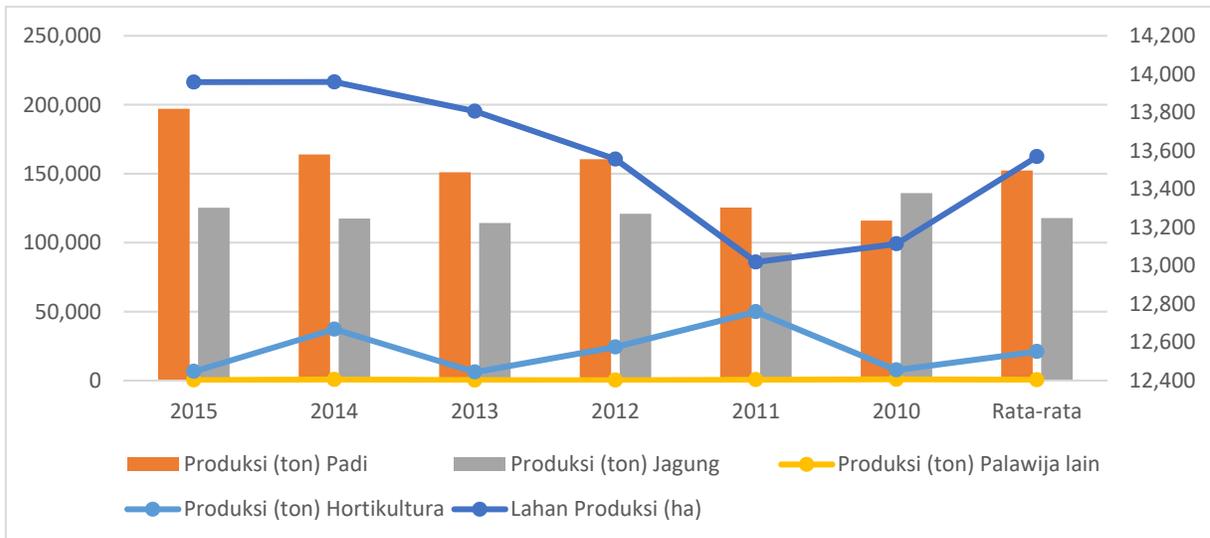
Gambar 1. Perkembangan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Gorontalo

Potensi Pertanian di Kabupaten Gorontalo

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Gorontalo tinggal di daerah perdesaan dan daerah pesisir, maka pengembangan dan peningkatan produksi pertanian dan perikanan merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian masyarakat yang cukup strategis.

Potensi Pertanian Tanaman Pangan

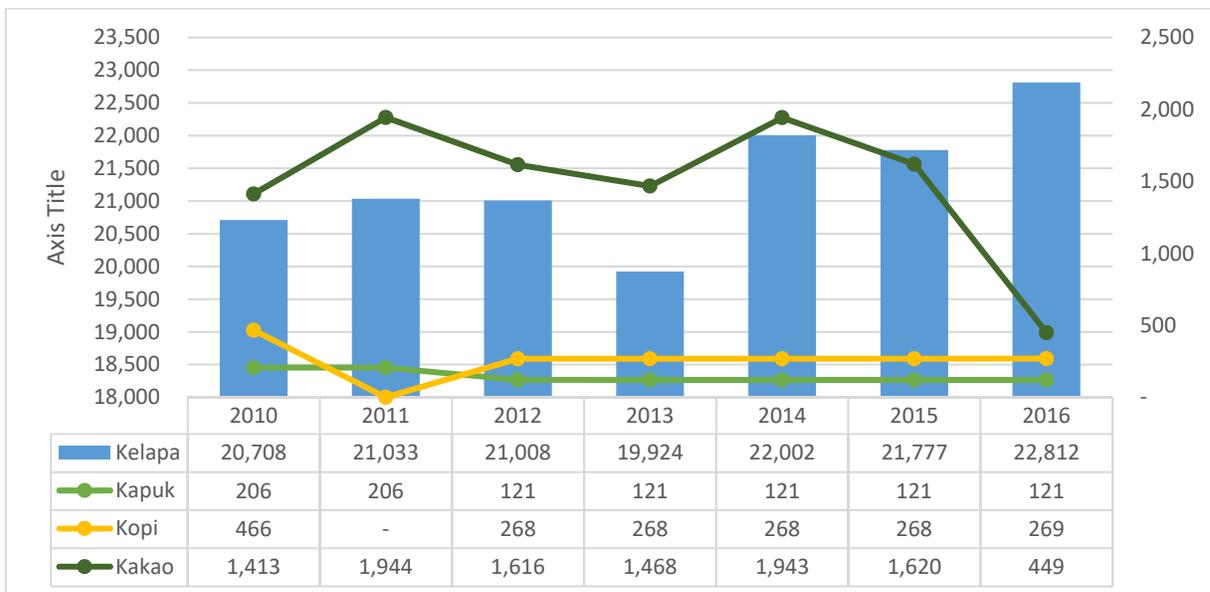
Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabuapten penghasil produk pertanian seperti padi dan jagung. Menurut Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabuapaten Gorontalo, sub sektor tanaman pangan yang dilakukan oleh masyarakat pada periode 2010-2015 adalah komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, selain itu petani juga menanam berbagai sayur dan buah-buahan. Potensi lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo adalah 15.569 ha dengan luas yang lahan terluas yang digunakan untuk sektor pertanian berada pada tahun 2014 seluas 13.959 Ha. Potensi lahan pertanian di Kabupaten Gorotalo yang paling banyak digunakan adalah untuk memproduksi padi (152.307 ton), jagung (117.805 ton) dan hortikultur (21.804). Padi dan jagung menjadi salah satu komoditi unggulan dan prioritas Kabupaten Gorontalo.



Gambar 2. Gambaran Lahan dan Produksi Komoditi Pertanian di Kabupaten Gorontalo Periode Tahun 2010-2015
Sumber: Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2011-2017

Perkembangan sektor perkebunan periode tahun 2010-2016 terfokus pada komoditi kapuk, kelapa, kopi dan kakao. Komoditi perkebunan yang menjadi unggulan adalah kelapa dan kakao perkebunan yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan rata-rata produksi pertahun mencapai 21,323.41 ton (kelapa) dan 1,492.02 ton (kakao). Berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman

Pangan dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo periode tahun 2010-2016, rata-rata produksi kapuk dan kopi sekitar 121 ton (kapuk) dan 268 ton (kopi) (Gambar 3). Adapun kecamatan yang memiliki rata-rata produktivitas tanaman perkebunan tertinggi adalah Kecamatan Bongomeme, Limboto dan Limboto Utara.



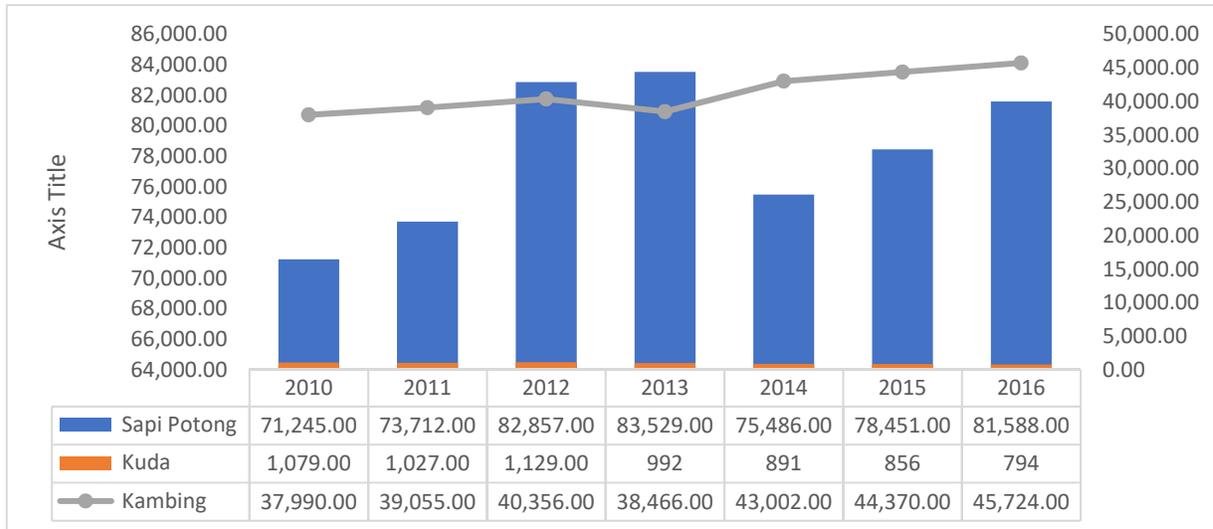
Gambar 3. Rata-rata Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kab Gorontalo (ton) periode Tahun 2010-2016

Sumber : Kabupaten Gorontalo Angka 2011-2017

Potensi Peternakan

Secara umum, populasi hewan ternak Kabupaten Gorontalo adalah sapi potong, kambing dan kuda (urut-urutan terbanyak hingga terkecil). Rata-rata populasi sapi potong terbesar berada di 2013 (83,529 ekor) dengan rata-rata populasi tahun 2010-2016

sebanyak 78,124 ekor. Populasi ternak kambing terbesar pada tahun 2016 (45,724.00 ekor) dengan rata-rata populasi ternak per tahun sejumlah 41,280 ekor per tahun. Populasi ternak kuda relatif kecil bila dibandingkan dengan sapi potong dan kambing hanya 1 persen atau 966 ekor per tahun (Gambar 4).



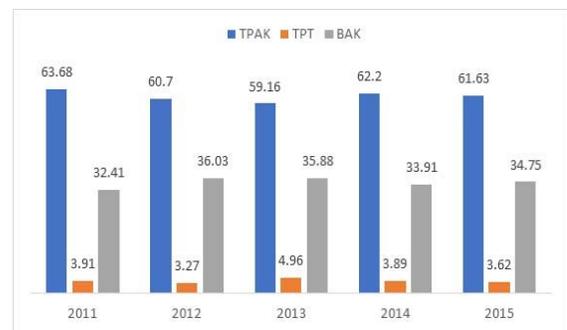
Gambar 4. Rata-rata Populasi Hewan Ternak di Kab Gorontalo (ton) periode Tahun 2010-2016
 Sumber : Kabupaten Gorontalo Angka 2011-2017

Selain hewan ternak, masyarakat Kabupaten Gorontalo juga yang mengelola ternak unggas yaitu ayam ras, ayam buras dan itik. Rata-rata populasi ternak unggas periode tahun 2010-2014 adalah 298,959 ekor (ayam ras), 296,205 (ayam buras) dan 13,417 ekor (itik). Terjadi peningkatan tajam populasi ayam ras menjadi 2,050,960 ekor (2015) dan ayam ras 3,257,628 ekor (2016), adapun perkembangan populasi ayam buras dan itik juga meningkat yaitu 448,275 ekor (ayam buras) dan 16.313 ekor (itik).

Tenaga kerja di Sektor Pertanian

Secara umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gorontalo tahun 2015 sebesar 61,73 persen, menurun menjadi 62,20 persen pada tahun 2014. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan yaitu 3.89 pada tahun 2014 menjadi 3.62 pada tahun 2015.

Sementara itu dari hasil pengolahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 dalam BPS Kabupaten Gorontalo 2014, dilihat dari komposisi penduduk usia kerja didapatkan bahwa penduduk usia kerja berpendidikan SD dan kurang SD masih mendominasi untuk semua kategori umur.



Gambar 5. Persentase Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Gorontalo Periode 2011-2015
 Sumber : BPS Kab Gorontalo 2011-2017 (diolah)

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

Lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan bidang usaha yang paling banyak diminati oleh penduduk umur 15 tahun Kabupaten Gorontalo pada periode tahun 2011-2016, terlihat dengan tren pertumbuhan populasi tenaga bidang tersebut yang cenderung meningkat 4-6 % per tahunnya. Populasi tenaga kerja bidang Pertanian, Kehutanan, perburuan dan perikanan pada tahun 2011 adalah 56,478 meningkat menjadi 65,029 pada tahun 2016 (Tabel 2). Lapangan pekerjaan utama lainnya yang memiliki populasi tenaga kerja tinggi adalah bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, dengan tingkat pertumbuhan antar 2-3 persen pertahun.

Menilik lebih dalam lagi, didapatkan bahwa sebagian besar dari penduduk usia kerja, yaitu sebesar 53.187 penduduk Kabupaten Gorontalo mempunyai kegiatan utama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Selanjutnya adalah untuk sektor industri sebesar 21.359 jiwa, pedagang besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 22.499 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan 19.075 jiwa dan pertambangan, listrik, gas, bangunan, transportasi, dan keuangan sebesar 25.151 jiwa. Secara keseluruhan sebagian besar penduduk di Kabupaten Gorontalo bermata pencaharian sebagai petani terutama di Kecamatan Boliyohuto yang merupakan pusat pengembangan komoditas pertanian.

Tabel 2. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama periode Tahun 2011-2016

Lapangan Pekerjaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Pertanian, Kehutanan, perburuan dan perikanan	56,478	58,864	53,187	67,319	61,512	65,029
Industri Pengolahan	26,425	24,316	21,359	25,772	17,775	18,376
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	21,643	21,198	22,499	23,065	29,533	24,662
Jasa Kemasyarakatan	21,934	17,622	19,075	17,837	27,542	24,611
Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas, Air, Bangunan, Transportasi, dan Keuangan)	26,102	26,705	25,151	22,745	21,263	23,757

Sumber: Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2012-2017 (diolah)

Pada tahun 2016, sekitar 41% penduduk yang berumur 15 Tahun Keatas diserap oleh sektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya adalah sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo sebesar 16%, sedangkan sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja di kabupaten ini sebesar 12%.



Gambar 6. Peran sektor ekonomi di Kabupaten Gorontalo dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Gorontalo

Potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari analisis sektor basis ekonomi yang ada. Berdasarkan perhitungan sektor basis,

dengan metode *Location Quotient* (LQ), didapatkan bahwa terdapat delapan sektor yang termasuk pada sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2010-2016 (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Analisis Sektor Basis Kabupaten Gorontalo Periode 2010-2016

Lapangan Usaha	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00
Pertambangan dan Penggalian	1.40	1.41	1.44	1.45	1.48	1.50	1.55
Industri Pengolahan	0.99	1.01	1.03	1.08	1.08	1.07	1.06
Pengadaan Listrik dan Gas	1.55	1.54	1.53	1.50	1.47	1.49	1.48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.39	0.38	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41
Konstruksi	1.39	1.40	1.37	1.35	1.33	1.30	1.32
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.81	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80
Transportasi dan Pergudangan	1.34	1.35	1.38	1.44	1.47	1.48	1.52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.93	0.91	0.89	0.90	0.90	0.89	0.87
Informasi dan Komunikasi	1.07	1.06	1.06	1.05	1.03	1.04	1.04
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.07	1.07	1.06	1.04	1.05	1.06	1.07
Real Estate	0.52	0.53	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54
Jasa Perusahaan	0.76	0.77	0.77	0.75	0.74	0.73	0.71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60
Jasa Pendidikan	0.82	0.83	0.80	0.78	0.77	0.78	0.78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.79	0.79	0.79	0.81	0.81	0.81
Jasa Lainnya	0.83	0.84	0.84	0.81	0.82	0.82	0.82
PDRB	1.00						

Sumber : data diolah

Sektor-sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Perdagangan; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi, yang memiliki nilai LQ yang lebih dari 1.

Analisa rasio PDRB Kabupaten Gorontalo (dengan *Shift Share*) tahun 2010-2016 didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 2. Berdasarkan hasil perhitungan *Shift Share* didapatkan nilai Ra sebesar 1,06 artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari kurun waktu 2010-2016 meningkat sebesar 1,06 kali.

Laju pertumbuhan sektor pertanian relatif tinggi, ini dapat dilihat dari nilai RI, yaitu 0,99. Nilai Ri yang paling besar adalah

sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang memperlihatkan bahwa sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan produksi tertinggi di tingkat Provinsi Gorontalo. Sedangkan laju pertumbuhan terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 0,26. Nilai ri bertanda positif menandakan sektor-sektor lapangan usaha menunjukkan terjadinya pertumbuhan produksi selama 2010-2016 di tingkat Kabupaten Gorontalo, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai 1,62. Dalam hal ini, sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga memiliki pertumbuhan produksi terendah. Sementara itu untuk sektor pertanian cukup tinggi, yaitu dengan nilai ri sebesar 0,95.

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

Tabel 4. Hasil Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Gorontalo

Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri	PN	PP	PPW	PB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.06	0.99	0.95	2,028.01	-120.85	-85.35	-206.21
Pertambangan dan Penggalian	1.06	0.61	0.79	109.44	-46.72	19.24	-27.48
Industri Pengolahan	1.06	1.11	1.27	206.64	10.48	32.01	42.49
Pengadaan Lisrik dan Gas	1.06	0.26	0.22	5.24	-3.94	-0.21	-4.15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.06	1.17	1.30	0.99	0.11	0.12	0.23
Konstruksi	1.06	1.10	1.01	831.30	37.54	-73.37	-35.84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.06	1.37	1.35	392.31	114.65	-5.98	108.67
Transportasi dan Pergudangan	1.06	1.29	1.62	380.04	83.76	118.49	202.25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.06	1.15	1.04	102.35	9.42	-10.97	-1.55
Informasi dan Komunikasi	1.06	0.96	0.92	148.28	-13.32	-6.05	-19.38
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.06	1.50	1.52	184.84	77.60	4.21	81.81
Real Estate	1.06	1.16	1.26	49.19	4.86	4.80	9.66
Jasa Perusahaan	1.06	0.98	0.85	3.96	-0.27	-0.50	-0.77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.06	0.61	0.67	290.21	-123.01	16.43	-106.58
Jasa Pendidikan	1.06	1.40	1.30	144.67	46.97	-13.08	33.89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.06	1.15	1.30	133.18	12.08	18.35	30.43
Jasa Lainnya	1.06	0.72	0.72	81.78	-26.14	0.07	-26.07

Berdasarkan nilai PN kontribusi sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan paling besar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 2.028,01 Juta. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang akan paling terpengaruh di Kabupaten Gorontalo jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Gorontalo.

Sektor yang memiliki nilai pertumbuhan proporsional (PP) cepat adalah sektor dengan nilai PP lebih dari 0. Nilai sektor pertanian adalah negatif, hal ini berarti bahwa sektor pertanian pertumbuhannya lambat.

Nilai PPW atau Nilai komponen pertumbuhan wilayah memperlihatkan daya saing yang dimiliki pada tiap sektor (lapangan usaha) di Kabupaten Gorontalo. Jika nilai PPW lebih besar dari 0 maka sektor tersebut memiliki daya saing. Berdasarkan hasil, didapatkan bahwa sektor yang memiliki daya saing terbesar adalah sektor Transportasi dan

Pergudangan. Sedangkan untuk sektor yang memiliki daya saing terendah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kemudian, nilai PB atau nilai pertumbuhan bersih memperlihatkan apakah sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang maju atau lamban di Kabupaten Gorontalo. Sektor yang merupakan sektor maju (atau progresif) adalah sektor dengan nilai PB lebih dari 0. Diperlihatkan bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang paling maju, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor paling lamban.

Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shift Share*, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sektor potensial yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Gorontalo. Sebagai contoh adalah sektor transportasi dan pergudangan yang merupakan sektor unggulan serta juga merupakan sektor yang paling berdaya saing dan berkembang paling maju. Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang

walaupun tergolong sektor lamban dan tidak berdaya saing, tetapi sektor ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dan menjadi sektor yang paling terkena efek jika ada perbaikan ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian pada Provinsi Gorontalo. Hal ini karena memang sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan sektor penggerak ekonomi utama di wilayah ini. Sehingga ketika ada perbaikan ekonomi di tingkat provinsi, sektor ini di tingkat kabupaten akan langsung terkena efek positif.

SUMBER PENERIMAAN PAD DARI SEKTOR PERTANIAN

Bagian ini menggambarkan peluang-peluang sumber pendapatan asli daerah untuk sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa peluang dalam penarikan pajak dan retribusi di bidang pertanian yang dapat menjadi sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah daerah. Adapun jenis pajak dan retribusi yang dimungkinkan adalah:

1. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, jenis pajak ini belum termuat sebagai salah satu opsi pajak daerah.

Di Kabupaten Gorontalo banyak tempat yang dapat dilakukan untuk pengembangan Peternakan Sarang burung walet, dari bangunan yang terbengkalai atau bangunan baru yang dikhususkan untuk burung walet. Pihak yang dibebani Pajak (Subjek Pajak)

Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Demikian pula pengusaha sarang burung walet berkedudukan pula sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet usaha yang akan dikenakan beban Pajak.

2. Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Saat ini kondisi BUMD Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan penerimaan, hal ini tidak terlepas dari kurang baiknya kinerja yang diberikan selama ini. Banyak faktor yang memberikan dampak tidak efektifnya BUMD yang ada. Ada beberapa peluang yang dapat dilakukan oleh BUMD yaitu usaha perdagangan sembako atau produk konsumsi lainnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pertanian (jangung dan atau kelapa) dan peternakan (sapi), selain itu BUMD juga dapat dibangun untuk usaha pariwisata (Danau Limboto).

Selain penetapan penarikan pajak dan retribusi yang ada selama ini dan yang akan ditetapkan juga membutuhkan dukungan kebijakan lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan pendukung dalam optimalisasi perolehan PAD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang akan mendorong kemampuan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.
2. Pengadaan festival-festival seperti “Festival Limboto” dimana memberikan beragam pilihan destinasi wisata alam, kuliner (tuna), dan kultur Gorontalo sendiri. Festival ini dapat juga dilakukan BUMD yang bermitra atau dibantu dari pihak CSR (*corporate social responsibility*) oleh perusahaan nasional. Adanya festival atau kegiatan kesenian untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang dan berbelanja di usaha-usaha masyarakat dan

Strategy to Increase Role of Agriculture to Local Revenue of Gorontalo Regency

meningkatkan pajak restoran dan retribusi usaha lainnya.

3. Pengembangan BUMDes untuk mengoptimalkan usaha-usaha masyarakat desa yang telah ada. Pengembangan BUMDes ini dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Melakukan *earmarking* dalam penggunaan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan tepat sasaran penggunaan dana pajak dan retribusi yang telah dibayarkan.

Menitik beratkan pembangunan pada sektor pertanian dan pariwisata, hal ini dikarenakan kedua sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar di Kabupaten Gorontalo. Untuk sektor Pertanian dibutuhkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang Agro-Kompleks di Kabupaten Gorontalo. Agro-Komplek adalah pengembangan Pertanian terpadu melalui keterkaitan antara pertanian, peternakan dan perikanan-kelautan. Untuk sector pertanian pengembangan diarahkan untuk komoditas pangan dan palawija, Sektor peternakan pengembangan diarahkan untuk komoditas sapi Potong, Sektor Perikanan-Kelautan pengembangan diarahkan untuk komoditas perikanan tangkap dan *value added* dari ikan rucah (sisa olahan ikan). Namun demikian sebelum pembentukan KEK tersebut dibutuhkan kajian secara mendalam terhadap rencana pengembangan pariwisata tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor basis di Kabupaten Gorontalo. Laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo relatif tinggi, berdasarkan nilai PN kontribusi sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan paling besar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

sebesar Rp 2.028,01 juta. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang akan paling terpengaruh di Kabupaten Gorontalo jika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Gorontalo. Tetapi memiliki daya saing dan pertumbuhan bersih yang rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shift Share*, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis, sehingga merupakan sektor unggulan, tetapi memiliki pertumbuhan yang lamban dan tidak berdaya saing di Kabupaten Gorontalo. Sektor ini merupakan sektor yang paling terkena efek jika ada perbaikan ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian pada Provinsi Gorontalo, karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan sektor penggerak ekonomi utama di wilayah ini. Sektor ini pun merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Sehingga ketika ada perbaikan ekonomi di tingkat provinsi, sektor ini di tingkat kabupaten akan langsung terkena efek positif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor pertanian ini, karena sektor ini merupakan sektor yang dapat menunjang sektor lainnya, terutama sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan keterkaitan dalam melakukan usaha antara produsen pertanian dengan kegiatan hulu dan hilirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- BAPPEDA. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2008-2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*

- Kabupaten Gorontalo 2008-2016.
Gorontalo (ID): Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
- BPS Kabupaten Gorontalo. 2011-2017.
Kabupaten Gorontalo Dalam Angka
2010-2016. Gorontalo
- Budiharsono, Sugeng. 2005. Teknis analisis
pembangunan wilayah pesisir.
Pradnya Paramita. Jakarta
- Falatehan AF, Syaikat Y, Raswatie FD,
Sari DAP. (2018). Planting and
Consumption Patterns of Upland
Rice Farmer in Indonesia. *Adri
International Journal of Agriculture*
1 (1): 224 – 229.
- Glasson, J. 1990. Pengantar Perencanaan
Regional. Terjemahan Paul
Sihotang. Jakarta: LPFEUI.
- Hidayati O, Siregar H, Falatehan AF.
(2017). Konversi Lahan Sawah di
Kota Bogor dan Strategi Anggaran
dalam Mengendalikannya. *Journal
of Regional and Rural Development
Planning*. 1(2) 217-230.
- Hidayat WOZ, Oktaviani R, Falatehan AF.
(2013). Strategi Penanggulangan
Kemiskinan di Tingkat Petani
Melalui Pengembangan Komoditas
Perkebunan di Kabupaten Muna.
*Jurnal Manajemen Pembangunan
Daerah* 5 (1): 16-31.
- Virnawati M, Hakim DB, Falatehan AF.
(2017). Strategi Peningkatan
Penerimaan Pajak Hotel di Kota
Sukabumi. *Matrik : Jurnal
Manajemen, Strategi Bisnis Dan
Kewirausahaan* 11 (2), 136-150.
- Perkebunan di Kabupaten Muna. *Jurnal
Manajemen Pembangunan Daerah* 5
(1): 16-31.
- Virnawati M, Hakim DB, Falatehan AF.
(2017). Strategi Peningkatan
Penerimaan Pajak Hotel di Kota
Sukabumi. *Matrik : Jurnal
Manajemen, Strategi Bisnis Dan
Kewirausahaan* 11 (2), 136-150.